

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
5. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
6. Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai F-hitung 37,342 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,33 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,684 atau sebesar 68,4% Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal sedangkan sisanya sebesar 31,6% ($100\% - 68,4\% = 31,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemungutan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan

mengevaluasi sistem pemungutan retribusi untuk melihat apakah masih terdapat praktik pungutan liar di dalamnya.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan DAU untuk pembangunan, investasi serta peningkatan fasilitas publik yang nantinya akan berdampak pada kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada DAK bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, perikanan, dan sarana dan prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup.
4. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan upaya dalam menggali potensi ekonomi daerah untuk menambah penerimaan sehingga tidak terjadi lagi ketidaksesuaian dalam alokasi dana belanja.
5. Pemerintah diharapkan memanfaatkan dana belanja modal dengan seoptimal mungkin untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di masa yang akan datang.
6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel dan variabel sehingga didapatkan kombinasi model penelitian yang baik untuk meneliti Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.